

Studi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Bumi Perkemahan Bedengan Malang

Alfian B. Firdaus^{1*}, dan Zainul Muhibbin²

Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

*e-mail: alfianbf2@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata berkelanjutan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemenparekraf mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan partisipasi masyarakat lokal sebagai pilar utama. Bumi Perkemahan Bedengan di Desa Selorejo, Kabupaten Malang, adalah contoh konkret, dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Bumi Perkemahan Bedengan Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Metode analisis data melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian hasil reduksi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan telah mencerminkan keempat bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi ide, tenaga, harta/benda, dan keterampilan/kemahiran. Untuk tingkatan partisipasi berada dalam kategori tingkat kuasa tertinggi.

Kata Kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Bentuk Partisipasi, Tingkatan Partisipasi

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan selaras dengan beberapa prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya penciptaan lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi (poin 8), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (poin 12), dan konservasi ekosistem darat (poin 15). Pariwisata berkelanjutan harus memperhitungkan dampak jangka panjang pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan (Wibowo & Belia, 2023) [1]. Saat ini Indonesia mengimplementasikan konsep Pariwisata Berkelanjutan, dengan menekankan pada perkembangan pariwisata yang berkelanjutan daripada jumlah kunjungan wisatawan, seperti dijelaskan oleh Kemenparekraf pada tahun 2021 [2]. Keberhasilan ini dapat diraih melalui partisipasi aktif masyarakat setempat dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, yang menjadi pilar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pariwisata (Sukandar, 2021) [3]. Keterlibatan aktif masyarakat membantu kebijakan pariwisata mencerminkan nilai-nilai lokal, menghormati budaya, dan mengurangi dampak lingkungan. Hal ini juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata, menciptakan peluang bisnis lokal seperti homestay dan kerajinan, serta membangun hubungan positif antara wisatawan dan komunitas setempat (Wibowo, 2023).

Bumi Perkemahan Bedengan Malang merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan partisipasi

masyarakat. Di sini, konsep pariwisata berkelanjutan mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi, termasuk penambahan fasilitas seperti taman bermain ergonomis. Partisipasi masyarakat juga mencakup dukungan untuk ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan peluang bagi mereka untuk menjadi pengelola atau petugas di area perkemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bumi Perkemahan Bedengan Malang, serta memberikan wawasan untuk kebijakan yang lebih efektif dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

2. URAIAN PENELITIAN

2.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Bumi Perkemahan Bedengan Malang?
2. Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Bumi Perkemahan Bedengan Malang?

2.2 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, peneliti hanya akan membahas bentuk partisipasi masyarakat dan identifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bumi Perkemahan Bedengan Malang.

2.2.1 Masyarakat

Menurut Emile Durkheim, masyarakat adalah entitas yang berdiri sendiri, terdiri dari individu-individu yang tinggal bersama dalam jangka waktu lama dan menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan, serta menjalani sistem kehidupan bersama. Ralph Linton menambahkan bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi yang berlangsung lama, yang menghasilkan tradisi dan kebiasaan tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang berinteraksi dalam hubungan sosial, memiliki kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta berbagi kebiasaan dan tradisi.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat meliputi berbagai aspek, seperti bentuk, tingkat, tahapan, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut:

A. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988) partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat bentuk [4], yaitu:

1. Partisipasi ide
Untuk mendukung program dan kegiatan yang diikutinya, seseorang dapat terlibat dengan menyumbangkan ide dan pendapat, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.
2. Partisipasi tenaga
Berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dapat berperan penting dalam mendukung kesuksesan program.
3. Partisipasi harta benda

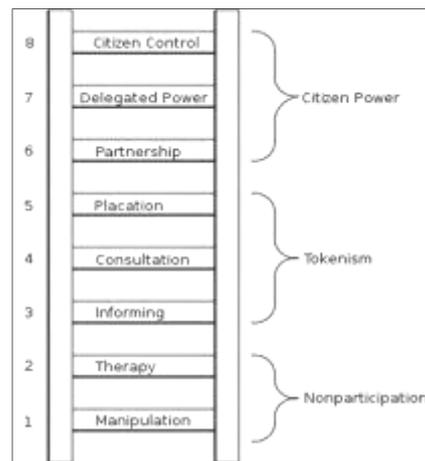
Berpartisipasi dengan menyumbangkan harta benda, biasanya dalam bentuk peralatan kerja atau perkakas.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Memberikan dorongan melalui keterampilan dan keahlian yang dimiliki kepada individu dalam masyarakat yang membutuhkan dukungan.

B. Tingkatan Partisipasi

Menurut Sherry R Arnstein (1969) [5], terdapat 8 tingkat partisipasi masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Berikut tingkatan partisipasi berdasarkan kekuasaannya:



Sherry R Arnstein menggambarkan tingkatan partisipasi sebagai tangga bertingkat, di mana semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula kekuasaan yang diberikan. Ilustrasi ini dikenal sebagai "*Ladder of Citizen Participation*" atau "*Arnstein's Ladder*". Terdapat 3 tingkatan kekuasaan, yaitu *Nonparticipation* (Tidak Berpartisipasi), *Tokenism* (Kekuatan Palsu), dan *Citizen Power* (Kekuatan Warganegara).

Mufidayati (2012) menjelaskan lebih lanjut mengenai "*Ladder of Citizen Participation*", yang terdiri dari 8 tingkatan [6], yaitu:

1. *Manipulation* (Manipulasi)
 Pada tingkat ini, partisipasi masyarakat diartikan sebagai minimnya komunikasi, terutama dalam aspek dialog.
2. *Therapy* (Terapi)
 Meskipun terdapat komunikasi antara warga dan pengambil keputusan, komunikasi tersebut dianggap terbatas dan hanya berlangsung satu arah untuk memenuhi prosedur formal. Prakarsa dan pengambilan keputusan sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi aktif masyarakat.
3. *Informing* (Pemberitahuan)
 Meskipun komunikasi sudah umum pada tingkat ini, komunikasi tersebut masih bersifat satu arah. Belum ada diskusi dan pertukaran ide yang terbuka pada tahap ini.
4. *Consultation* (Konsultasi)
 Pada tingkat ini, komunikasi sudah berlangsung dua arah, namun masyarakat belum mampu menekankan kepentingan mereka dengan cukup kuat untuk memengaruhi pengambilan keputusan.
5. *Placation* (Penentraman)

Pada tingkat ini, komunikasi berjalan dengan baik, dan terjadi dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah.

6. *Partnership* (Kemitraan)

Pada tingkat ini, masyarakat dapat menjadi mitra setara dengan pemerintah.

7. *Delegated Power* (Pendelegasian Kekuasaan)

Pada tingkat ini, pemerintah memberi masyarakat kesempatan untuk secara mandiri mengambil inisiatif dalam memenuhi kebutuhan mereka.

8. *Citizen Control* (Kontrol Warga)

Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik dari awal hingga akhir, termasuk proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

C. Tahapan Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1977) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam beberapa tahap [7], yaitu:

1. Tahap Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*)

Tahap partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan melalui pertemuan.

2. Tahap Pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Tahap ini krusial dalam proses pembangunan karena berfokus pada pelaksanaan. Partisipasi mencakup sumbangan ide, dukungan materi, dan tindakan langsung sebagai bagian dari program.

3. Tahap Menikmati Hasil (*Participation in Benefits*) Tahap ini menggambarkan sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi pada keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat yang berfungsi sebagai agen pembangunan dapat memperbesar dampak positif program dan mencapai tujuan secara efektif.

4. Tahap Evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Tahap ini penting karena partisipasi masyarakat berfungsi sebagai umpan balik yang memberikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa depan.

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi

Partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan suatu program. Faktor internal muncul dari kelompok masyarakat itu sendiri, termasuk hubungan antar individu dalam kelompok dan unit kelompok. Karakteristik sosiologis seperti gender, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengetahuan memengaruhi perilaku individu (Slamet, 2003). Menurut Holil (1980) terdapat empat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Salah satu faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah komunikasi yang intensif di dalam lingkungan seseorang, antara anggota masyarakat satu sama lain, dan antara sistem sosial dalam masyarakat dan sistem eksternal.
2. Faktor-faktor seperti iklim sosial, budaya, ekonomi, dan politik mendukung pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat yang meliputi kehidupan berkeluarga, pergaulan, permainan, sekolah, dan interaksi dalam masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi, struktur sosial dan kondisi lingkungan, serta norma dan prinsip yang mendorong terjadinya partisipasi.
4. Keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial, budaya, dan politik memungkinkan individu dan kelompok untuk mengambil inisiatif dan berkreasi.

2.2.3 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang tidak hanya menanggapi tantangan yang dihadapi oleh wisatawan dan komunitas lokal, tetapi juga berusaha melindungi serta memaksimalkan peluang yang ada. Menurut Hadiwijoyo (2012), pariwisata berkelanjutan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi wisatawan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan menyediakan peluang kerja bagi generasi muda, dengan tetap memperhatikan struktur sosial yang ada. Pariwisata berkelanjutan mencerminkan kemampuan suatu destinasi untuk tetap bersaing di tengah berbagai tantangan dengan menjaga kualitas lingkungan yang menarik bagi pengunjung serta mempertahankan keunikan budayanya. Pendekatan model pariwisata berkelanjutan dianggap lebih menjanjikan karena dapat memberikan manfaat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat.



Pariwisata berkelanjutan bertujuan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pariwisata dan wisatawan, sambil melindungi lingkungan serta mempertahankan peluang bagi generasi mendatang tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika. Prinsip ini menekankan pentingnya melestarikan integritas budaya, lingkungan, keanekaragaman hayati, dan sistem-sistem pendukung kehidupan (Stănciulescu, 2000). "Pariwisata berbasis alam" biasanya merujuk pada perjalanan ke area-area alami, sedangkan ekowisata adalah bentuk khusus dari pariwisata berbasis alam yang memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan destinasi, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan, budaya, dan ekonomi. Konsep ekowisata menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat sosial dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan (Ionescu, 2000).

2.2.4 Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merangkum model pembangunan yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Emil Salim (1990) menekankan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia [8]. Pembangunan berkelanjutan umumnya ditandai oleh kemampuannya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memperhatikan kondisi fisik dan sosial, serta berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini juga menekankan pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keamanan nasional (Ruhenda et al., 2016). Menurut Iwona (2012), pembangunan berkelanjutan adalah proses yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar keberlanjutan.

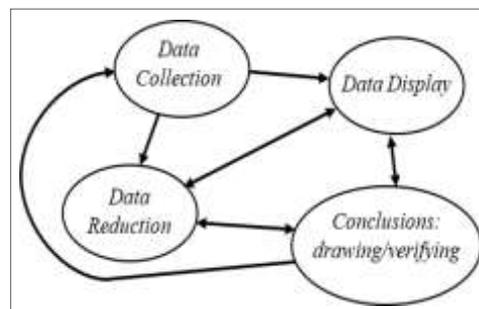
3.METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengambilan Data

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Dalam pendekatan ini, informan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka yang paling relevan dengan subjek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Ini membantu peneliti mendapatkan lebih banyak informasi tentang subjek atau situasi sosial yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2016) [9]. Data primer dan sekunder, yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka, digunakan untuk mengumpulkan data.

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga kegiatan analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hasil reduksi, dan penarikan kesimpulan.



1. *Data Reduction*

Tujuan mereduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan jelas tentang pengumpulan data dengan memfokuskan pada elemen penting dan mengidentifikasi pola dan tema yang relevan.

2. *Data Display*

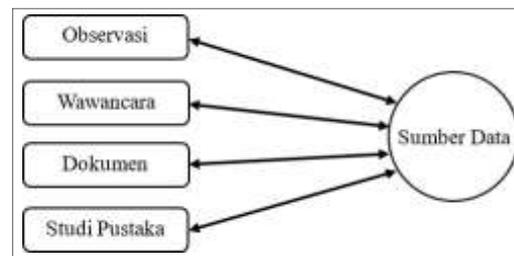
Menurut Miles dan Huberman (1984), Penelitian kualitatif sering mengkomunikasikan data melalui teks naratif. Metode ini memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya karena teks naratif dapat memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dikumpulkan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Pada tahap ini, kesimpulan awal merupakan kesimpulan sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang mendukung selama pengumpulan data. Namun, jika ada bukti yang konsisten dan valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan awal tersebut dapat dianggap dapat dipercaya..

3.3 Uji Keabsahan Data

Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas dan realibilitas data yang diperoleh. Dengan triangulasi, metode berbeda digunakan untuk menganalisis informasi dari sumber yang sama untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data.



Untuk mengumpulkan data yang mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan berbagai metode, termasuk observasi, wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka. Metodologi triangulasi digunakan untuk mendukung validitas hasil penelitian dan memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menangani aspek penelitian yang kompleks.

4. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Studi ini mengeksplorasi analisis mendalam tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya di Bumi Perkemahan Bedengan Malang. Studi kasus ini menunjukkan peran aktif masyarakat dalam membuat kebijakan dan praktik pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

4.1 Bentuk Partisipasi dalam Pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan Malang

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988), bentuk partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Partisipasi ide

Masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan pariwisata merupakan pihak yang terlibat dalam hal ini. Pembicaraan antar pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi kreatif untuk membuat rencana yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manajemen Bumi Perkemahan Bedengan secara aktif menerima aspirasi dari masyarakat sekitar, termasuk warga Desa Selorejo dan pemilik UMKM yang ada di lokasi. Mereka juga menerima masukan dari beberapa pengunjung yang disampaikan kepada pemilik UMKM dan kemudian disampaikan kepada manajemen. Untuk memastikan Bumi Perkemahan Bedengan sesuai dengan keinginan masyarakat lokal, proses partisipasi ide ini dilakukan.

2. Partisipasi tenaga

Untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, partisipasi tenaga harus mendukung masyarakat lokal dengan memberikan pelatihan keterampilan dan program pengembangan usaha kecil. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab atas tempat mereka berada. Terlihat dari para warga, pengelola, dan pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjaga kebersihan dan berkolaborasi dalam pembangunan Bumi Perkemahan Bedengan Malang. Akibatnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi efek negatif dan mendorong pariwisata yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

3. Partisipasi harta benda

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat mencakup penyediaan peralatan kerja, dana untuk pembangunan, atau penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan. Para pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Perkemahan Bedengan Malang sering berpartisipasi dalam inisiatif ini dengan menyediakan makanan dan minuman kepada para pengelola sebagai bentuk upaya untuk mendukung kegiatan di wilayah tersebut.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Bumi Perkemahan Bedengan Malang dibangun oleh masyarakat lokal yang memiliki keterampilan khusus, seperti tukang kayu dan tukang cat, yang menunjukkan partisipasi keterampilan dan kemahiran dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan mereka meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proyek dan mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih hemat biaya.

Keempat bentuk partisipasi tersebut dapat ditemukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bumi Perkemahan Bedengan Malang.

4.2 Tingkatan Partisipasi dalam Pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan Malang

Hasil dari analisis data yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga Desa Selorejo dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Bumi Perkemahan Bedengan Malang tidak berada pada tingkat paling bawah yaitu *Nonparticipation* (Tidak Berpartisipasi).

a. *Tokenism*

Pada tingkatan *Tokenism* atau Kekuatan Palsu, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi partisipasi mereka hanyalah simbol atau tanda dan tidak memiliki kekuatan atau dampak yang signifikan terhadap proses tersebut. Terdapat tiga tingkatan dalam *Tokenism*, yaitu:

1. *Informing* (Pemberitahuan)

Pada tingkat ini, komunikasi sudah terjalin, tetapi masih searah. Informasi tentang rencana dan kebijakan telah diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak ada mekanisme yang memungkinkan mereka untuk memberi masukan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut orang yang diwawancarai di Bumi Perkemahan Bedengan Malang, manajemen telah memberi tahu masyarakat sekitar tentang perkembangan wisata yang sedang dilakukan.

2. *Consultation* (Konsultasi)

Komunikasi pada tingkat ini sudah berjalan dua arah, di mana masyarakat, pengelola dan pemilik UMKM memberikan ide dan masukan untuk rencana dan kebijakan. Meskipun ada interaksi, pihak yang berwenang tetap memiliki keputusan akhir, dan masyarakat tidak memiliki pengaruh langsung pada proses pengambilan keputusan.

3. *Placation* (Penentruman)

Pada tingkat ini, komunikasi telah berjalan dengan baik, dan diskusi telah terjadi antara masyarakat, pengelola, pemilik UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun pihak berwenang mencoba memberi kesan bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka tetap memiliki keputusan akhir.

b. *Citizen Power*

Dalam hierarki partisipasi, *Citizen Power* atau kekuatan warganegara adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling kuat. Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kontrol total atas proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Terdapat tiga tingkatan dalam *Citizen Power*, yaitu:

1. *Partnership* (Kemitraan)

Pada tingkat ini, masyarakat setara dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan membuat keputusan. Meskipun masih ada kontrol dari pihak berwenang, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan jalan dan strategi. Terlihat dari beberapa masyarakat yang memiliki saran untuk membangun tempat istirahat untuk tukang parkir, tetapi pihak manajemen Bedengan memilih berkonsentrasi pada perbaikan jalan.

2. *Delegated Power* (Pendelegasian Kekuasaan)

Pada tingkat ini, masyarakat diberi otoritas untuk membuat keputusan tentang

beberapa aspek kebijakan atau pengelolaan. Proses pengambilan keputusan dimiliki sebagian besar oleh masyarakat. Melalui wawancara yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa keputusan masih dipegang oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan tidak mencapai tingkatan *Delegated Power* (Pendelegasian Kekuasaan).

3. *Citizen Control* (Kontrol Warga)

Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keputusan dibuat melalui proses demokratis dan melalui kesepakatan yang dibuat dengan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Melalui wawancara yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa keputusan masih dipegang oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan tidak mencapai tingkatan *Citizen Control* (Kontrol Warga).

Secara keseluruhan, maka tingkat partisipasi masyarakat dari uraian diatas pada tingkat kekuasaan *Tokenism* (Kekuatan Palsu) terdapat *Informing* (Pemberitahuan), *Consultation* (Konsultasi), dan *Placation* (Penentraman), sedangkan pada tingkat kekuasaan *Citizen Power* (Kekuatan Warganegara) hanya terdapat *Partnership* (Kemitraan). Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Bumi Perkemahan Bedengan berada pada tingkat *Partnership* (Kemitraan) di tingkat kekuasaan *Citizen Power* (Kekuatan Warganegara).

5.KESIMPULAN/RINGKASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Selorejo dalam pengembangan Bumi Perkemahan Bedengan mencakup semua bentuk partisipasi menurut konsep Keith Davis (1988). Masyarakat aktif terlibat dalam memberikan ide dan aspirasi kepada manajemen Bedengan sebagai bentuk partisipasi ide. Selain itu, mereka menunjukkan partisipasi tenaga secara langsung dalam pembangunan dan kebersihan lingkungan. Ibu-ibu pemilik UMKM berpartisipasi dalam harta benda dengan menyediakan makanan ringan dan minuman. Selanjutnya, masyarakat yang memiliki keterampilan khusus dalam pengerjaan kayu juga membangun fasilitas seperti gazebo dan jembatan, menunjukkan partisipasi keterampilan dan kemahiran yang esensial untuk keamanan dan fungsionalitas bangunan.
2. Tingkatan partisipasi masyarakat Desa Selorejo dalam konsep "*Ladder of Citizen Participation*" oleh Sherry R. Arnstein (1969) mencapai tingkat *Partnership* (Kemitraan). Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dianggap setara dengan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun masih ada kontrol dari pihak berwenang. Contohnya, masyarakat menyarankan untuk membangun wahana baru di Bumi Perkemahan Bedengan, namun aspirasi tersebut perlu dirundingkan dengan pihak berwenang karena fokus manajemen Bedengan saat ini adalah memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata agar lebih mudah diakses oleh wisatawan dan pengelola.

6.DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25-32.
- [2] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (hal. 2–75). Jakarta: Kemenparekraf.
- [3] Sukandar, M., & Kinseng, R. A. (2021). Hubungan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata dengan Penguasaan *Livelihood Assets*. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(6), 757-767.
- [4] Sukesthi, Woro (2013) *Partispasi Masyarakat Dalam Perayaan Upacara Tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo Di Desa Pondok Wonolelo Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta*.
- [5] Arnstein, S. R. (2004). Citizen Participation is citizen power. *A Ladder of Citizen Participation*, 35(4), 216–224.
- [6] Abidin, M. Z. (2021). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 81– 99.
- [7] Tumbel Mentari, S. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- [8] Prathama, A., Nuraini, R. ., & Firdausi, Y. (2020). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik (JSEP)*, 1(3), 29–38.
- [9] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- [10] Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang. (2021). *Profil Kabupaten Malang Edisi 2021* (Edisi ke-2021). Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang.
- [11] Donny, P., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515.
- [12] Dwi, R. S. (2020). *Kesesuaian Pengembangan Kawasan Air Terjun Anglo dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan*.
- [13] Eraku, S. S., Pambudi, M. R., & Kobi, W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Botubarani. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 2(1), 1-8.
- [14] Gaber, J. (2020). Building “a ladder of citizen participation”: Sherry Arnstein, citizen participation, and model cities. In *Learning from Arnstein's Ladder* (pp. 13-34). Routledge.
- [15] Indriani, C. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*.
- [16] Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi masyarakat pada penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (studi kasus desa wisata pujon kidul, kabupaten malang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124-135.
- [17] Kurniawati, R. (2013). Modul Pariwisata Berkelanjutan. *Pariwisata Berkelanjutan*, 71.
- [18] Lumbantobing, T. R. R., & Ginting, N. (2022). Gambaran Partisipasi Masyarakat pada Pariwisata Berkelanjutan di Simanindo, Samosir. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (Vol. 5, No. 1, pp. 18-24).
- [19] Moira, P., Kakaroucha, P., & Mylonopoulos, D. (2021). Lighthouse Tourism: Suggestions for an Innovative and Sustainable Use of the Greek Traditional Lighthouses. *International Journal of Hospitality & Tourism Studies (IJHTS)*, 2(2).
- [20] Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, S., & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 2(1).
- [21] Mustikasari, M. (2017). Partispasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur.
- [22] Nofriya, N. (2018). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Di Kota Bukittinggi Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*.
- [23] Pemerintah Kabupaten Malang. (2005). Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2005

Tentang Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH).

- [24] Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164-171.
- [25] Sunarta, N., & Arida, N. S. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar, Bali: CAKRA PRESS.
- [26] Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *None*, 6(1), 161029.